

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) PROVINSI RIAU
TAHUN 2018**

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Riau Tahun 2018 merupakan kewajiban konstitusional Gubernur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Penyampaian RLPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepada DPRD, dan ILPPD Kepada Masyarakat. Penyampaian RLPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2018 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Provinsi Riau terletak pada $01^{\circ} 05' 00''$ Lintang Selatan sampai $02^{\circ} 25' 00''$ Lintang Utara dan $100^{\circ} 00' 00''$ Bujur Timur - $105^{\circ} 05' 00''$ Bujur Timur. Provinsi Riau memiliki luas wilayah yaitu $\pm 90.128,76 \text{ Km}^2$, terdiri dari 2 (dua) Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai serta 10 (Sepuluh) Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Provinsi Riau memiliki 166 kecamatan dan 268 kelurahan dan 1.592 desa.

Gambaran umum penduduk Provinsi Riau pada tahun 2018, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,36 persen dari 6.657.911 jiwa pada tahun 2017, menjadi 6.814.909 jiwa pada tahun 2018. Pertambahan jumlah penduduk ini menyebabkan kepadatan penduduk Provinsi Riau meningkat, dari 74,68 jiwa/Km² pada tahun 2017 menjadi 75,61 jiwa/Km² pada tahun 2018. Bila diamati dinamika kependudukan di Riau sejak tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk baru mencapai 6,19 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 6,34 juta jiwa dan pada tahun 2016 bertambah lagi menjadi 6,50 juta jiwa. Pada tahun 2017 pertambahan penduduk Riau tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya yakni sudah mencapai 6,66 juta jiwa dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 6,81 juta jiwa.

Penduduk miskin di Provinsi Riau pada Maret 2018 adalah sebanyak 500,44 ribu jiwa atau sebesar 7,39 persen, menurun jika dibandingkan dengan posisi Maret 2017 yang berjumlah 514,62 ribu jiwa atau sebesar 7,78 persen. Ini berarti pada tahun 2018 ini terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 14,18 ribu jiwa atau turun sebesar 2,76

persen. Sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penduduk miskin Riau mengalami penurunan walaupun pada tahun 2015 ada sedikit kenaikan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 7,99 persen, akibat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi karena adanya migrasi penduduk pada tahun 2015 sehingga persentase penduduk miskin Riau naik menjadi 8,82 persen. Namun melalui berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan pada tahun 2016 sampai dengan posisi Maret 2018 secara konsisten persentase penduduk miskin Riau dapat ditekan menjadi sebesar 7,39 persen yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional yang mencapai 9,82 persen.

Kondisi perekonomian Provinsi Riau pada tahun 2018 dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan nasional yang mulai menunjukkan *trend* positif, namun pada akhir tahun kembali melemah. Dalam lingkup industri dan pertanian, kenaikan harga migas dan harga komoditas perkebunan memberi dampak positif kepada pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari naiknya pendapatan per kapita Provinsi Riau berdasarkan harga berlaku dengan migas dari Rp105,99 juta pada tahun 2017 menjadi Rp110,83 juta pada tahun 2018. Kondisi tersebut lebih jelas bila ditinjau berdasarkan harga berlaku tanpa migas yang mengalami kenaikan dari Rp82,43 juta pada tahun 2017 yang diproyeksikan meningkat menjadi Rp86,19 juta pada tahun 2018. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 tanpa migas di Provinsi Riau juga menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 tanpa migas sebesar Rp56,78 juta, diperkirakan menjadi Rp58,36 juta pada tahun 2018. Pencapaian dari sisi ekonomi ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dan menjadi perhatian kita bersama demi kesejahteraan masyarakat Riau. Dukungan dan kerjasama dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat dan semua pihak kita harapkan dapat terus dilanjutkan pada masa yang akan datang.

Upaya untuk memperkuat ekonomi Provinsi Riau harus kita fokuskan kepada peningkatan investasi PMA dan PMDN, mengingat Provinsi Riau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Selanjutnya karena sebagian besar penduduk Riau bekerja di sektor pertanian maka peningkatan pendapatan petani melalui pembenahan struktur pasar, peningkatan kualitas komoditas pertanian, pengembangan industri hilir perlu diperbaiki secara meluas dan komprehensif termasuk upaya mentransformasi sektor primer ke sektor sekunder secara terintegrasi.

Pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 adalah sebesar 2,34 persen yang sedikit melambat jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2017 yakni sebesar 2,71 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Lainnya yakni sebesar 8,67 persen diikuti oleh sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,19 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,47 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perekonomian Riau menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, kecuali pada sektor

Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen.

Menyangkut inflasi, dalam jangka waktu Januari sampai Desember 2018 inflasi di Riau sebesar 2,45 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,43 pada Desember 2017 menjadi 136,69 pada Desember 2018. Secara umum tingkat inflasi di Provinsi Riau relatif stabil ditandai dengan fluktuasi inflasi yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2014 inflasi di Provinsi Riau adalah 8,65 persen, tahun 2015 turun menjadi 2,65 persen, tahun 2016 kembali meningkat menjadi 4,04 persen. Kondisi tersebut relatif stabil sampai tahun 2017 yakni 4,20 persen dan pada tahun 2018 mampu dikendalikan sehingga hanya sebesar 2,45 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian investasi tersebut kita capai sedemikian rupa karena faktor-faktor pendukungnya tetap dapat kita wujudkan ke arah yang positif. Nilai ekspor Riau termasuk migas pada tahun 2014 mencapai US\$18,7 milyar, dan pada tahun 2017 relatif lebih rendah yakni sebesar US\$16,1 milyar. Sampai triwulan ketiga 2018 total nilai ekspor Riau sebesar US\$14,75 milyar. Penurunan nilai ekspor tersebut terjadi akibat adanya kontraksi nilai ekspor migas yang sangat signifikan. Namun bila kita lihat nilai ekspor non migas mengalami peningkatan walaupun relatif kecil yakni US\$13,04 milyar pada tahun 2014 menjadi US\$13,81 milyar pada tahun 2017. Sedangkan sampai triwulan ketiga 2018 sudah mencapai US\$12,25 milyar.

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang memuat Visi Provinsi Riau, yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat yang sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunkannya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur.”

Berdasarkan Visi tersebut telah ditetapkan, sembilan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pematapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Implementasi dari sembilan Misi pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan lima tahunan yaitu RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi di atas, antara lain dalam bentuk penggalian berbagai sumber daya potensial yang dimiliki oleh Provinsi Riau melalui perumusan

perencanaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, melaksanakan pembangunan yang fokus dan tepat sasaran serta evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan. Penjabaran dari strategi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 ditempuh dengan arah kebijakan seperti meningkatkan kualitas pembangunan jaringan infrastruktur, meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu dan keagamaan, meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Guna mendukung pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Riau berusaha mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Dalam tahun 2018, Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dapat direalisasikan sebesar Rp8,479 triliun dari target sebesar Rp9,237 triliun atau 91,79 persen.

Secara terinci, Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp3,639 triliun atau 91,80 persen dari target Rp3,964 triliun. Jika dibandingkan dengan PAD tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp279 milyar atau 8,30 persen. Dilihat dari masing-masing komponen PAD terdapat dua komponen yang meningkat yakni penerimaan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Sementara itu terdapat dua komponen yang mengalami penurunan yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Pada periode 2014-2018 jumlah pendapatan yang diterima oleh Provinsi Riau baik bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2014 total realisasi pendapatan sebesar Rp8,11 triliun lebih dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp8,47 triliun lebih. Namun Pendapatan Asli Daerah *trendnya* meningkat dari Rp3,23 triliun lebih tahun 2014 menjadi Rp3,63 triliun lebih pada tahun 2018.

Pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2018 mengalami dinamika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana Perimbangan tahun 2018 sebesar Rp4,82 triliun lebih, pada tahun 2017 meningkat Rp288,53 milyar lebih atau 6,36 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2018 dari pendapatan hibah sebesar Rp12,072 milyar meningkat Rp8,994 milyar atau 292,20 persen dari tahun 2017. Pada periode 2014-2018 jumlah pendapatan yang diterima oleh Provinsi Riau dari Pendapatan Dana Perimbangan berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2014 total realisasi pendapatan sebesar Rp4,23 triliun lebih dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp4,82 triliun lebih. Pada periode yang sama jumlah pendapatan yang diterima oleh Provinsi Riau dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2014 dan 2015, jumlahnya sangat besar karena termasuk alokasi dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sejak tahun 2016 dialihkan ke pos Dana Perimbangan.

Belanja Daerah tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp10,32 trilyun lebih, terealisasi sebesar Rp8,46 trilyun lebih atau 82,02 persen. Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp5,77 trilyun lebih, terealisasi Rp5,20 trilyun lebih atau 90,22 persen dan Belanja Langsung Rp4,55 trilyun lebih, terealisasi Rp3,25 trilyun lebih atau 71,61 persen. Pada periode 2014-2018 belanja daerah berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2014 belanja daerah sebesar Rp5,60 trilyun lebih meningkat menjadi Rp9,18 trilyun lebih pada tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp8,46 trilyun lebih pada tahun 2018.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2018 telah dilaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 8 penunjang urusan, pendukung, dan pengawasan yang dilaksanakan. Belanja langsung pada urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 99 program dan 596 kegiatan, urusan wajib non pelayanan dasar 100 program dan 543 kegiatan, urusan pilihan 71 program dan 419 kegiatan, serta penunjang urusan pendukung, dan pengawasan yang dilaksanakan 120 program dan 619 kegiatan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan 496 program dalam bentuk 4.105 kegiatan, dengan realisasi anggaran Rp2,17 trilyun lebih, pada tahun 2015 dilaksanakan 489 program dalam bentuk 3.756 kegiatan, dengan realisasi Rp3,62 trilyun lebih. Pada tahun 2016 dilaksanakan 525 program dalam bentuk 3.927 kegiatan, dengan realisasi Rp4,27 trilyun lebih, pada tahun 2017 dilaksanakan 463 program dalam bentuk 2.888 kegiatan, dengan realisasi Rp4,25 trilyun lebih. Dan pada tahun 2018 dilaksanakan 390 program dalam bentuk 2.177 kegiatan, dengan realisasi Rp3,25 trilyun lebih.

Tugas Pembantuan diselenggarakan melalui APBN tahun 2018 sebesar Rp171,44 milyar lebih. Realisasi keuangannya sebesar Rp154,15 milyar lebih atau 89,91 persen dengan realisasi fisik 91,95 persen. Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau berasal dari lima kementerian, yakni: Kementerian Pertanian; Sosial; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas pembantuan meliputi enam OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dalam kurun waktu 2014-2019, Tugas Pembantuan yang diterima pada tahun 2014 dari enam kementerian dilaksanakan oleh delapan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp84,58 milyar lebih. Pada tahun 2015 diterima Tugas Pembantuan dari enam kementerian yang dilaksanakan oleh delapan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp165,22 milyar lebih. Pada tahun 2016 diterima Tugas Pembantuan dari enam kementerian yang dilaksanakan oleh delapan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar

Rp100,72 milyar lebih. Pada tahun 2017 diterima Tugas Pembantuan dari enam kementerian yang dilaksanakan oleh tujuh OPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp136,57 milyar lebih. Sedang pada tahun 2018 diterima Tugas Pembantuan dari lima kementerian yang dilaksanakan oleh enam OPD dengan anggaran sebesar Rp154,15 milyar lebih.

Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yaitu penyelenggaraan, melalui peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Di Provinsi Riau kerjasama antar daerah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.245/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Riau. Hasil kerjasama sepanjang tahun 2018 antara lain adalah kerjasama dengan provinsi lainnya melalui Forum Gubernur se Wilayah Sumatera yang diselenggarakan pada tanggal 21-23 November 2018, dan kerjasama luar negeri seperti kegiatan pengembangan perdagangan lintas batas Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepulauan Riau-Peringkat Negeri Johor/Malaka.

Sepanjang periode 2014-2018 berbagai kerjasama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah telah disepakati dan ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota seperti memfasilitasi PEKAN SIKAWAN dan SIAP BEDELAU;
2. Kerjasama dengan provinsi lain dalam bentuk Forum Gubernur se Wilayah Sumatera;
3. Kerjasama dengan negara lain dalam bentuk pengembangan Perdagangan Lintas Batas/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepulauan Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah dalam bentuk kerjasama antara lain dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Kepolisian Daerah Riau dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Badan Standarisasi Nasional, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Universitas Riau bersama Kadin Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kadin Kabupaten Indragiri Hilir. Selama periode 2014-2018 berbagai kerjasama dengan Pihak Ketiga tetap berlangsung dan terus mengalami perkembangan yang positif.

Selanjutnya perlu pula disampaikan mengenai koordinasi dengan instansi vertikal baik pada tahun 2018 maupun sepanjang periode 2014-2018 terus dilaksanakan terutama untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kebakaran lahan/hutan dan banjir, fasilitasi siswa berprestasi, hak asasi manusia, penempatan tenaga dokter spesialis, pengamanan, pembangunan, keagamaan, dan perbatasan.

Berkenaan dengan berbagai bencana yang terjadi baik pada tahun 2018 maupun pada periode 2014-2018 telah dilakukan upaya-upaya penanganan secara komprehensif dan terpadu serta berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta. Penetapan status siaga untuk kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Riau dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan *early warning system* sehingga penanganan korban bencana dapat segera diantisipasi dan diatasi.

Kinerja Pemerintah Provinsi Riau baik tahun 2018 maupun sepanjang 2014-2018 masih mendapatkan penilaian akuntabilitas kinerja dengan kategori B. Namun pada kesempatan sidang yang terhormat ini ingin pula kami laporkan bahwa beberapa prestasi yang dicapai Pemerintah Provinsi Riau sebagai suatu keniscayaan dan dapat dibanggakan yaitu Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya, Anugerah Kencana, Lencana Dharma Bakti Pramuka, Penghargaan Pramakarya dari berbagai bidang, yang secara rinci kami jelaskan dalam buku laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tiap tahunnya. Prestasi-prestasi tersebut bukanlah merupakan kerja kami sendiri melainkan adalah hasil kerja kita bersama dan dukungan serta kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Sudah sepantasnya kami pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada masyarakat Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, Forkopimda dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Semoga kerja keras kita bersama akan memberi manfaat kepada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau. Patut kiranya kita menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua perlindungan dan anugerah-Nya sehingga kita mampu mencapai prestasi-prestasi tersebut.

Demikian RLPPD ini disampaikan pada Masyarakat luas. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat disampaikan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477 Pekanbaru.

Pekanbaru, Februari 2019
GUBERNUR RIAU,

*H. WAN THAMRIN HASYIM